

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK TIM PEMENANGAN DEDI DAN TOPANI
PADA PILKADA 2024 KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**

Irfan Nurudin¹, Nadirsah Hawari², Gesit Yudha³

Fakultas Ushuluddin & Studi Agama, Program Studi Pemikiran Politik Islam

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: irfannurudin047@gmail.com

Email: nadirsahhawari@radenintan.ac.id; gesit@radenintan.ac.id

ABSTRACT

The 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Pesisir Barat Regency reveals a gap between the relatively balanced parliamentary support of the candidate pairs and the final vote results. Despite similar levels of party backing, the election outcomes show significant differences in vote result, raising questions about the role of political communication strategies in influencing voter preferences. This study aims to analyze the political communication strategy implemented by the campaign team of Dedi Irawan and Irawan Topani in navigating the competition of the 2024 Pesisir Barat Pilkada. This research employs a qualitative approach with a descriptive design. The data consist of primary and secondary sources. Primary data were obtained through in-depth interviews with the Secretary of the Dedi & Topani Campaign Team, members of rival campaign teams, and election organizers. Secondary data were collected from official KPU documents, election regulations, and relevant literature on political strategy and communication. The findings indicate that the political communication strategy of the Dedi & Topani campaign team was not rigidly based on initial planning but evolved dynamically in response to field conditions. Within the framework of strategy as plan, the team conducted mapping of political strengths, vote distribution areas, and potential threats down to the polling station level as the basis for field operations. Through strategy as ploy and strategy as pattern, the team managed issues related to bureaucratic neutrality, clarified public perceptions regarding social assistance programs, and implemented repetitive face-to-face campaign activities. In terms of strategy as position, Dedi & Topani were framed as symbols of change, with a particular focus on young voters. Meanwhile, strategy as perspective was reflected in the team's internal worldview that interpreted political competition as an opportunity to build public awareness of the need for change. This communication strategy has led to increased political understanding among some members of the community, although regional election outcomes are often influenced by local power dynamics, political resources, and a pragmatic political culture.

Keywords: Regional Head Election, Political strategy, Campaign team.

ABSTRAK

Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan dukungan politik parlemen dan hasil perolehan suara pasangan calon. Meskipun dukungan partai relatif seimbang, hasil Pilkada memperlihatkan perbedaan suara yang cukup signifikan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai peran strategi komunikasi politik dalam memengaruhi pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh Tim Pemenangan pasangan Dedi Irawan dan Irawan Topani dalam menghadapi persaingan Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Sekretaris Tim Pemenangan Dedi & Topani, tim pemenang pasangan calon lain, serta penyelenggara Pilkada. Data sekunder bersumber dari dokumen resmi KPU, regulasi Pilkada, dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

literatur yang relevan dengan kajian strategi dan komunikasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik Tim Pemenangan Dedi & Topani tidak dijalankan secara kaku berdasarkan perencanaan awal, melainkan berkembang mengikuti dinamika lapangan. Dalam kerangka *strategy as plan*, tim melakukan pemetaan kekuatan politik, wilayah suara, dan potensi ancaman hingga tingkat TPS sebagai dasar kerja lapangan. Selanjutnya, melalui *strategy as ploy dan pattern*, tim mengelola isu netralitas aparat, meluruskan pemahaman masyarakat terkait bantuan sosial, serta menerapkan pola kampanye tatap muka yang dilakukan secara berulang. Pada aspek *strategy as position*, pasangan Dedi & Topani diposisikan sebagai simbol perubahan dengan fokus pada segmen anak muda. Sementara itu, *strategy as perspective* tercermin dari cara pandang internal tim yang memaknai persaingan sebagai ruang untuk membangun kesadaran masyarakat akan kebutuhan perubahan. Strategi komunikasi ini berdampak pada bertambahnya pemahaman politik sebagian masyarakat, meskipun hasil Pilkada seringkali dipengaruhi oleh faktor kekuasaan lokal, sumber daya politik, dan budaya politik pragmatis.

Kata kunci: Pilkada, Strategi politik, Tim pemenangan.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah salah satu aspek dari otonomi daerah, yang berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilkada merupakan hak serta kewenangan pemerintah daerah yang wajib melaksanakan pemilihan kepada daerah yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola semua urusan pemerintahan daerah (Salim, 2019). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia, yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih pemimpin daerah. (Suyatno, 2016). Pilkada serentak yang empat kalinya dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Indonesia ini menjadi penanda penting bagi penguatan konsolidasi demokrasi di tingkat daerah. (Nasuhaidi et al., 2025). Menurut Qhorin 2021 dalam (Aldiyani Rizky, 2022). Pelaksanaan Pilkada di Indonesia mengalami transformasi signifikan sejak penerapan pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005. Guna mengatasi ketidaksinkronan jadwal, pemerintah menerapkan sistem Pilkada serentak sejak 2015 secara bertahap hingga Pilkada serentak nasional 2024 yang menyatukan seluruh pemilihan kepala daerah. Melalui kebijakan ini, proses demokrasi lokal diharapkan berlangsung lebih efisien, terstruktur, serta mampu meningkatkan legitimasi pemerintahan daerah. (Yalimo, n.d.). Sejak berakhirnya Orde Baru, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia diatur melalui tiga rezim undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menetapkan pemilihan oleh DPRD, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memperkenalkan pemilihan kepala daerah secara langsung, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sebagai landasan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. (Dkk, 2017) Merujuk Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, partai politik hanya dapat mendaftarkan calon apabila memiliki minimal 20% kursi DPRD atau memperoleh sedikitnya 20% akumulasi suara sah pada pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. (Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, 2016)

Dari 15 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung Kabupaten Pesisir Barat adalah salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2024 (Prima, n.d.), sementara masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal & Zulqoni berakhir pada 26 April 2026, dan pemangkasan masa jabatan kepala daerah telah memperoleh legitimasi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XX/2022 sebagai kebijakan transisional dan sekali terjadi guna mewujudkan pemilihan serentak nasional 2024 (Redaksi, 2023). Peserta Pilkada Pesisir Barat 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

25

Indexed



SINTA 4



seluruhnya diusung oleh gabungan partai politik, tanpa satu pun pasangan yang maju melalui jalur independen.

Dalam tahapan pencalonan Pilkada Pesisir Barat 2024, seluruh pasangan calon mendaftarkan diri ke KPU Pesisir Barat sesuai jadwal yang ditetapkan. Pasangan N. Lingga Kusuma dan Erlina menjadi pasangan pertama yang melakukan pendaftaran pada hari kedua tahapan pencalonan, Rabu, 28 Agustus 2024 (Gustina, 2024). Pada hari yang sama, pasangan Septi Heri Agusnaeni dan Ade Abdul Rochim juga mendaftarkan pencalonannya ke KPU Pesisir Barat (Prantoso, n.d.) Selanjutnya, pada 29 Agustus 2024, pasangan Dedi Irawan dan Irawan Topani menyusul mendaftarkan diri sebagai bakal calon dalam Pilkada (Aidil, 2024). Sebelumnya, pasangan Septi Heri Agusnaeni dan Ade Abdul Rochim telah memperoleh rekomendasi resmi dari DPP Partai NasDem melalui Surat Rekomendasi Nomor 416-SI/RP/BPP-NasDem/VII/2024 yang diserahkan pada 31 Juli 2024 (WH, 2024).

Pasangan Dedi Irawan dan Irawan Topani, S.H., MKn. memperoleh dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (4 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (1 kursi), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4 kursi), serta Partai Bulan Bintang yang tidak memiliki kursi di parlemen, sehingga total akumulasi dukungan mencapai 9 kursi. Pasangan Septi Heri Agusnaeni, S.E., M.H. dan Ade Abdul Rochim diusung oleh Partai NasDem yang menguasai 6 kursi dan Partai Gerindra dengan 1 kursi, dengan total dukungan sebanyak 7 kursi. Sementara itu, pasangan Ir. N. Lingga Kusuma, M.P. dan Erlina, S.P., M.H. didukung oleh koalisi Partai Amanat Nasional (2 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (3 kursi), Partai Golkar (3 kursi), dan Partai Demokrat (1 kursi), yang secara keseluruhan memberikan dukungan politik sebesar 9 kursi. (Barat, 2024) Berdasarkan komposisi dukungan partai politik, setiap pasangan calon memiliki basis kekuatan parlemen yang berbeda dalam kontestasi tersebut.

Munculnya tiga pasangan calon dalam Pilkada Pesisir Barat 2024 dapat dipandang sebagai indikator berjalannya demokrasi lokal yang cukup baik. Tidak adanya calon tunggal menunjukkan adanya kompetisi elektoral yang terbuka, sehingga mencerminkan kondisi demokrasi yang relatif sehat di tingkat lokal. (Walisongo, 2023). Ketiga pasangan calon dalam Pilkada Pesisir Barat 2024 memiliki basis dukungan dan program unggulan yang berbeda. Diketahui Dedi Irawan, seorang pengusaha dengan pengalaman kepartaian dan legislatif. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat periode 2012–2017, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat periode 2014–2019, serta menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat periode 2022–2027. (Silviana, 2024a). Selanjutnya, Septi Heri Agusnaeni merupakan istri dari bupati sebelumnya dan memiliki pengalaman dalam kepemimpinan organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita di Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada periode 2011–2012, Ketua Ikatan Adhyaksa Dharma Karini pada periode 2012–2013, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Barat pada periode 2021–2024. (Silviana, 2024c) dan selanjutnya Nirmala Lingga Kusuma adalah mantan birokrat dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Bupati Pesisir Barat pada periode 2021–2022. (Silviana, 2024b).

Kajian terdahulu oleh (Maulida & Kurniawan, 2021) menjelaskan Eva Dwiana dan Deddy Amrullah bersama tim pemenang menerapkan empat strategi utama, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi sumber daya, dan strategi kelembagaan. Strategi sumber daya ditopang oleh keterlibatan partai pengusung, partai pendukung, serta tim pemenang, dengan dukungan pendanaan yang mayoritas berasal dari dana pribadi dan relatif lebih besar dibandingkan pasangan calon lainnya. Sementara itu, strategi kelembagaan dijalankan melalui peran partai politik, relawan, LSM, serta Majelis Taklim Rahmat Hidayat yang berada di bawah kepemimpinan langsung Eva Dwiana Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Goestyari Kurnia Amantha, 2021) menjelaskan bahwa pasangan Nanang-Pandu mampu mengatasi faktor eksternal dan faktor internal selama proses pemilihan kepala daerah di Lampung Selatan. Pasangan tersebut mampu memaksimalkan kekuatan, peluang kelemahan dan meminimalisir ancaman. Kemudian penelitian yang dilakukan (Britto et al., 2021) menunjukkan bahwa strategi

komunikasi politik pasangan calon kepala daerah dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dari komponen komunikasi yakni ; komunikator, pesan, media, khalayak, dan umpan balik. Melalui pertimbangan komunikasi tersebut memberi kemenangan pada pemilihan kepala daerah Semarang tahun 2020. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada analisis strategi berbasis sumber daya, kelembagaan, SWOT, maupun unsur komunikasi secara parsial, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan konsep strategi (5P) dari Henry Mintzberg sebagai kerangka utama untuk menganalisis strategi komunikasi politik tim pemenang dalam konteks Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024.

Secara konseptual, strategi dipahami sebagai perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam konteks kompetisi politik. Menurut (Pearce & Robinson, 2008) dalam (Goestyari Kurnia Amantha, 2021) Strategi merupakan perencanaan dalam mensukseskan tujuan dalam segala aktifitas. Baik dalam mensukseskan peperangan, kompetisi maupun yang lainnya). Hal ini sejalan dengan konsep strategi menurut Henry Mintzberg dalam (Lia Lestari Anjelina, 2025) menjelaskan konsep strategi menjadi lima. Strategi merupakan sebuah rencana (*plan*), pola (*Pattern*), posisi (*position*), taktik (*ploy*), dan perspektif (*perspective*). Penetapan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam kampanye, sebab jika penetapan strategi salah atau keliru maka hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, materi & tenaga. (Cangara, 2018a). Rogers (1982) dalam (Cangara, 2018b) memberikan batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui ide-ide baru. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi politik tim pemenang dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 dengan menggunakan konsep strategi dari Mintzberg serta unsur-unsur komunikasi politik sebagai kerangka analisis dalam menginterpretasikan temuan lapangan.

Urgensi penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian ilmiah yang secara khusus membahas Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat. Sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat baru tiga kali menyelenggarakan Pilkada. Kondisi tersebut menyebabkan dinamika politik lokal, pola persaingan politik, serta strategi komunikasi politik yang berkembang di daerah ini belum banyak terdokumentasi dan dianalisis secara mendalam dalam penelitian akademik. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian terkait Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus memberikan pemahaman awal mengenai karakteristik politik lokal dan praktik komunikasi politik tim pemenang.

Perbedaan hasil perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 menunjukkan bahwa kemenangan elektoral tidak semata-mata ditentukan oleh dukungan partai politik maupun pengalaman kandidat. Strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh tim pemenang memiliki peran penting dalam memengaruhi preferensi pemilih di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis strategi komunikasi politik tim pemenang Dedi & Topani pada Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 dengan menggunakan konsep strategi lima P (5P) Henry Mintzberg dan unsur-unsur komunikasi politik sebagai kerangka analisis.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh tim pemenang, berdasarkan pengalaman, pandangan, dan tindakan para aktor yang terlibat. Menurut (Moleong, 2018), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, dan literatur yang relevan. (Sugiyono, 2022) menyatakan bahwa

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

27

Indexed



SINTA 4



data primer bersumber langsung dari objek penelitian.

Tabel 1: Data Narasumber atau Informan

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Husaini, S.Pd.I	Sekretaris Tim Pemenangan Paslon Dedi & Topani
2	Ruspandi	Ketua HKBN (Himpunan Kemuakhian Bang Naim)Juru kampanye Paslon Septi & Ade
3	Rohan Efendi	Ketua Tim Pemenangan Paslon Lingga & Erlina
4	Miftah Farid, S.I.Kom	Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat

Sementara data sekunder diperoleh melalui sumber tidak langsung, data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung berupa dokumen resmi KPU Kabupaten Pesisir Barat, pemberitaan pada website berita daring, serta dokumen dan literatur yang relevan dengan strategi komunikasi politik dalam Pilkada Pesisir Barat 2024. Strategi komunikasi politik dalam penelitian ini dijelaskan melalui analisis dan uraian data empiris sehingga dapat menggambarkan kondisi dan dinamika yang terjadi selama proses pemenangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Sugiyono, 2022)Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh (Moleong, 2018)yaitu melalui tiga tahapan, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk memastikan keabsahan data dan hasil penelitian, dilakukan pemeriksaan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Moleong (2018) menjelaskan bahwa uji keabsahan data diperlukan agar temuan penelitian dapat dipercaya. Triangulasi sumber, menurut Sugiyono (2022), dilakukan dengan cara membandingkan dan memadukan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen yang berkaitan dengan strategi politik pemenangan pasangan Dedi–Topani dalam Pemilukada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Provinsi Lampung Untuk memperkuat objektivitas analisis, penelitian ini juga menampilkan pandangan dari tim pemenangan pasangan calon lain sebagai data pelengkap.

PEMBAHASAN

Hasil hitung suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 Pasangan Dedi Irawan Irawan Topani memperoleh suara tertinggi dibandingkan dua pasangan yang lainnya. Pasangan Dedi & Topani memperoleh suara sebanyak 48.103 atau 51,47% dan pasangan Septi & Ade memperoleh suara sebanyak 41.008 atau 43,89% dan terakhir pasangan Lingga-Erlina memperoleh suara sebanyak 4.324 atau 4,63%. (Umum, 2024). Meskipun ketiga pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 memiliki dukungan parlemen yang relatif seimbang, hasil pemilihan menunjukkan perbedaan perolehan suara yang cukup tajam. Pasangan Dedi Irawan dan Irawan Topani memperoleh lebih dari separuh suara sah, sementara pasangan Lingga & Erlina hanya meraih suara dalam jumlah kecil.

Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Situasi ini menunjukkan adanya persaingan antarcalon yang memberikan masyarakat beberapa pilihan dalam menentukan pemimpin daerah. Dalam kondisi seperti ini, cara pasangan calon dan tim pemenangan menyampaikan pesan politik kepada masyarakat menjadi bagian penting dari proses Pilkada, karena berhubungan langsung dengan upaya menarik dukungan pemilih.

Perencanaan Strategi Komunikasi Politik oleh Tim Pemenangan (*Strategy as Plan*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Dedi & Topani, strategi awal yang dijalankan berfokus pada pemetaan kekuatan dan potensi politik yang dimiliki. *“Yang pertama kami lakukan adalah pemetaan potensi dan kekuatan yang ada, sekaligus menggunakan analisis SWOT agar posisi kami dalam kontestasi benar-benar terbaca, baik keunggulan, kelemahan, peluang, maupun ancamannya. Selanjutnya kami masuk ke pemetaan lapangan secara detail, terutama di kantong-kantong suara, hingga memastikan kerja tim menjangkau sampai ke tingkat TPS.”* Pemetaan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kerja lapangan yang terukur, termasuk penghitungan kebutuhan tim berdasarkan jumlah pemilih serta penggunaan berbagai bentuk pendekatan kepada masyarakat.

Namun, dalam kerangka *strategy as plan*, perencanaan strategi pemenangan tidak dipahami sebagai dokumen yang bersifat statis, melainkan sebagai rancangan awal yang disiapkan untuk menghadapi dinamika politik lokal. Perencanaan yang matang memang menjadi fondasi awal, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuan tim pemenangan membaca respons pemilih, kekuatan aktor lokal, serta perubahan konstelasi dukungan di lapangan. Dalam konteks Pilkada Pesisir Barat, kondisi sosial-politik yang relatif cair menuntut strategi yang adaptif dan tidak kaku. Oleh karena itu, strategi sebagai *plan* perlu dilengkapi dengan praktik penyesuaian berkelanjutan agar perencanaan tidak berhenti sebagai dokumen teknis, melainkan berfungsi secara nyata dalam menghadapi realitas kontestasi politik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi pemenangan bersifat dinamis dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi hanya melalui perencanaan awal. Strategi yang telah disusun sebagai *plan* pada tahap awal berfungsi sebagai kerangka kerja, namun dalam praktiknya harus terus diuji dan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

Taktik Komunikasi dan Pola Kampanye Politik (*Strategy as Ploy & Patern*)

Informasi yang diperoleh dari Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Dedi & Topani menunjukkan bahwa tim pemenangan memberikan perhatian khusus pada isu netralitas aparat pemerintahan karena pasangan yang dihadapi merupakan petahana. Pengawasan tidak hanya diarahkan kepada pejabat eksekutif, tetapi juga pada penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, KPPS, hingga Panwas, agar tetap bekerja secara profesional. Tim pemenangan mencermati setiap indikasi keterlibatan aparat dalam politik praktis dan mendorong penanganannya melalui mekanisme pengawasan yang berlaku. Selain itu, tim juga melakukan edukasi langsung kepada pemilih untuk meluruskan isu-isu yang beredar, terutama terkait bantuan sosial yang kerap dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu. Dalam praktik kampanye, pola pendekatan dibedakan berdasarkan tingkat wilayah, mulai dari kehadiran langsung kandidat dalam pertemuan akbar hingga pembekalan teknis oleh tim khusus di tingkat operasional.

Praktik tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari strategi yang dijalankan melalui taktik tertentu dan pola kerja yang berulang. Upaya meluruskan isu bantuan sosial dan mengawasi netralitas aparat menunjukkan adanya taktik komunikasi yang digunakan untuk merespons situasi dan langkah politik lawan. Sementara itu, pola konsolidasi yang dilakukan secara berulang, seperti pertemuan akbar di setiap kecamatan dan pembagian peran antara kandidat dan tim, memperlihatkan adanya pola tindakan yang dijalankan secara konsisten. Dalam kerangka komunikasi politik, tim pemenangan berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan klarifikasi dan penguatan kepada pemilih melalui saluran tatap muka, dengan sasaran yang disesuaikan berdasarkan tingkat wilayah dan peran masing-masing tim.

Dalam konteks Pilkada, praktik komunikasi dan kampanye seperti ini menunjukkan bahwa strategi pemenangan tidak hanya dijalankan melalui program dan janji politik, tetapi juga melalui pengelolaan isu dan pola kerja tim di lapangan. Taktik komunikasi yang digunakan untuk merespons isu-isu tertentu berjalan beriringan dengan pola kampanye yang terus diulang di berbagai wilayah. Pola ini memperlihatkan bagaimana tim pemenangan menyesuaikan cara berkomunikasi dengan kondisi sosial dan politik setempat, sekaligus menjaga kesinambungan kerja antara tingkat kecamatan hingga TPS.

Positioning Politik dan Segmentasi Khalayak Pemilih (*Strategy as Position*)

Berdasarkan penjelasan Ahmad Husaini, tim pemenangan menempatkan pasangan calon sebagai sosok pembawa perubahan dengan segmentasi pemilih yang disusun secara jelas. “Kami memposisikan kandidat sebagai sosok pembawa perubahan dengan segmentasi pemilih yang jelas, mulai dari anak muda hingga petani dan nelayan. Dari seluruh segmen tersebut, isu anak muda menjadi fokus utama karena kami ingin mereka merasa dilibatkan dan melihat kandidat sebagai representasi harapan. Branding kandidat dibangun sebagai pasangan yang membumi, terbuka, dan dekat dengan masyarakat, baik melalui kehadiran langsung di lapangan maupun komunikasi aktif di media sosial agar tetap menonjol dibandingkan kandidat lain.”(Husaini Ahmad, 2025)

Strategi sebagai posisi (*strategy as a position*) sebagaimana dikemukakan oleh Mintzberg. Penekanan pada segmen anak muda menunjukkan adanya pilihan posisi yang dibangun secara sadar untuk menempatkan pasangan Dedi & Topani sebagai representasi perubahan dan keterbukaan di benak pemilih. Pilihan posisi ini tidak hanya diarahkan pada upaya menarik dukungan elektoral, tetapi juga pada pembentukan citra kandidat.

Penempatan posisi yang berfokus pada segmen anak muda dapat dipahami sebagai respons terhadap perubahan karakter pemilih dalam konteks Pilkada lokal. Kelompok anak muda tidak semata-mata dipandang sebagai kekuatan jumlah, tetapi juga sebagai kelompok simbolik yang merepresentasikan gagasan perubahan dan keterbukaan. Dengan menempatkan pasangan Dedi & Topani pada posisi tersebut, tim pemenangan berupaya membangun pembeda citra dibandingkan kandidat lain.

Perspektif Nilai dan Peran Komunikator dalam Pembentukan Citra Politik (*Strategy as Perspective*)

Mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, tim pemenangan pasangan Dedi Irawan dan Irawan Topani semangat perubahan muncul sebagai kerangka berpikir yang mendasari cara tim memandang kontestasi Pilkada. Informan menuturkan bahwa “semangat yang kami bangun adalah semangat perubahan. Kami menyadari kompetitor tetap memiliki kekuatan, dan justru di situlah tantangan bagi kami untuk menunjukkan bahwa kami bisa lebih kuat. Di sisi lain, mereka juga memiliki kelemahan, dan kelemahan itulah yang kami jadikan ruang untuk memperkuat posisi kami. Peluang-peluang yang mungkin mereka miliki pun kami tutup dengan membangun kesadaran masyarakat bahwa Pesisir Barat membutuhkan perubahan yang lebih baik dan relevan dengan harapan masyarakat hari ini.” (Husaini Ahmad, 2025) Dalam kerangka *strategy as perspective* Mintzberg, data ini menunjukkan bahwa strategi tim pemenangan dibangun dari cara pandang internal dalam membaca dinamika persaingan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam pesan politik.

Uraian informan menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik tim pemenangan dibangun dari cara pandang tertentu dalam memaknai persaingan Pilkada. Semangat perubahan yang terus ditekankan menjadi dasar bagi tim dalam melihat posisi lawan, baik dari sisi kekuatan maupun kelemahan. Cara pandang ini kemudian memengaruhi bagaimana pesan politik disusun dan disampaikan kepada masyarakat. Dalam kerangka *strategy as perspective* Mintzberg, strategi terlihat bukan sebagai rencana teknis semata, tetapi sebagai perspektif yang membimbing tindakan dan komunikasi tim pemenangan selama proses Pilkada berlangsung. Dari sudut pandang peneliti, temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dijalankan lebih berfungsi sebagai upaya membangun makna perubahan di tengah masyarakat, daripada sekadar menyampaikan janji politik secara formal.

Komunikasi Politik Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati.

1. Pola Penokohan dan Pembagian Peran Komunikator Politik.

Dalam strategi komunikasi politik Tim Pemenangan Dedi & Topani, kandidat ditempatkan sebagai komunikator politik utama. Hal ini dijelaskan oleh Ahmad Husaini, selaku Sekretaris Tim Pemenangan Dedi & Topani, bahwa “*pertama tentu dari kandidat itu sendiri. Kandidat menjadi wajah utama, sumber*

pesan, sekaligus penentu arah komunikasi politik yang disampaikan ke publik.” Kandidat tidak hanya berfungsi sebagai simbol elektoral, tetapi juga sebagai pengarah utama pesan dan narasi politik. Ahmad Husaini juga menjelaskan bahwa tim humas berperan mengelola arus informasi dan membangun citra kandidat, sementara Ketua dan Sekretaris Tim Pemenangan ditempatkan sebagai juru bicara resmi yang *“secara struktural diberi mandat untuk menyampaikan pernyataan ke publik maupun media.”* Pola ini menunjukkan adanya pembagian peran komunikator yang relatif rapi dan terkoordinasi di internal tim.

Sementara itu, komunikasi politik Tim Pemenangan Septi & Ade di Pilkada Pesisir Barat 2024 banyak ditentukan oleh peran elit partai, kandidat, dan aktor lapangan. Agus Istiqlal sebagai Ketua NasDem menjadi penggagas awal koalisi dengan pertimbangan membuka akses politik di tingkat pusat. Septi Heri Agusnaeni kemudian tampil sebagai kandidat calon bupati dan menjadi wajah utama koalisi, sedangkan Ade Abdul Rochim diposisikan sebagai figur penguat jejaring nasional. Namun, karena Ade relatif baru dikenal masyarakat Pesisir Barat, tim membentuk HKBN sebagai penggerak basis. Ruspandi, selaku Ketua HKBN dan salah satu juru kampanye, menjelaskan bahwa *“HKBN dibentuk sebagai wadah penguatan basis dan bergerak sampai ke seluruh kecamatan seperti tim pemenangan”*. (Ruspandi, 2025) Kehadiran HKBN menunjukkan upaya tim untuk menutup keterbatasan popularitas kandidat melalui penguatan jaringan sosial di tingkat akar rumput.

Berbeda dengan dua tim sebelumnya, Tim Pemenangan Paslon Lingga & Erlina tidak mengandalkan satu figur komunikator saja. Rohan Efendi selaku Ketua Tim Pemenangan menjelaskan bahwa *“pada garis besar kita masuk dan menguasai komunikasi, artinya kita tidak memilih,”* (Rohan, 2025) namun dalam praktiknya tim sangat menyesuaikan siapa yang berbicara dengan kondisi sosial dan kultural masyarakat di setiap wilayah. Di daerah tertentu, tokoh lokal sengaja ditampilkan karena lebih memahami bahasa, logat, dan karakter warga. Ia menyebutkan bahwa *“kalau masuk daerah Lampung tulen, maka kita ambil tokoh-tokoh yang piawai menyampaikan pesan dengan bahasa Lampung.”* Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas komunikator politik yang disesuaikan dengan konteks lokal.

Dalam persaingan politik lokal Pilkada Pesisir Barat 2024, perbedaan penempatan komunikator politik pada tiap tim pemenangan menunjukkan strategi yang disesuaikan dengan kekuatan kandidat dan karakter pemilih. Tim Dedi & Topani mengandalkan kandidat dan dibantu oleh Tim Inti pemenangan sebagai pusat komunikasi untuk menjaga konsistensi pesan dan citra, Tim Septi & Ade menggunakan pola berlapis dengan melibatkan elite partai dan jaringan basis untuk memperluas jangkauan komunikasi, sementara Tim Lingga & Erlina menerapkan pendekatan fleksibel berbasis tokoh lokal agar pesan lebih mudah diterima secara kultural. Variasi strategi ini menegaskan bahwa komunikasi politik di tingkat lokal tidak hanya soal isi pesan, tetapi juga tentang ketepatan memilih figur yang menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat.

2. Bingkai Pesan Politik dalam Persaingan Pilkada

Pesan politik Tim Pemenangan Dedi & Topani berfokus pada narasi perubahan. Ahmad Husaini menegaskan bahwa *“pesan utama yang selalu kami sampaikan sekali lagi adalah perubahan.”* Narasi ini dimaknai sebagai upaya memberi kesempatan kepada masyarakat Pesisir Barat untuk memperbaiki kesejahteraan dan menentukan masa depan mereka sendiri. Mengingat Dedi Irawan merupakan pendatang baru dalam kontestasi Pilkada Pesisir Barat, pesan tersebut dirancang untuk mengaitkan pilihan politik masyarakat dengan harapan perubahan kondisi sosial dan ekonomi ke depan.

Sementara itu, pesan politik Septi - Ade berangkat dari visi Mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat yang Mandiri dan Berkelanjutan. Visi ini diposisikan sebagai arah kepemimpinan Septi Heri Agusnaeni bersama Ade Abdul Rochim dalam mendorong kemandirian daerah dan kesinambungan pembangunan. Ruspandi menjelaskan bahwa *“visi mandiri dan berkelanjutan ini kami bawa sebagai tawaran perubahan arah pembangunan Pesisir Barat ke depan.”* Namun, pesan ini berhadapan dengan kejenuhan politik masyarakat, sebagaimana diungkapkan bahwa *“masyarakat Pesisir Barat saat itu sudah berada pada titik jenuh dengan pola kepemimpinan yang berulang.”*

Adapun pesan politik tim pemenang Lingga & Erlina menitikberatkan pada isu kedekatan identitas dan pengalaman kandidat. Isu wongge dewe (wong Jowo), persoalan Way Haru, rekam jejak kandidat sebagai wakil bupati dan sekretaris daerah, serta dukungan sembilan kursi DPRD dijadikan pesan penguat. Rohan Efendi menyatakan *bahwa "perhitungannya jikalau konstituen tegak lurus maka sudah aman."* Pesan ini menunjukkan upaya membangun kedekatan emosional sekaligus keyakinan publik terhadap stabilitas politik pasangan tersebut.

Pesan politik tiap pasangan disusun untuk menyesuaikan kondisi dan kebutuhan pemilih. Tim Dedi & Topani mengusung pesan perubahan untuk menarik masyarakat yang menginginkan harapan dan perbaikan ke depan. Tim Septi & Ade menawarkan visi kemandirian dan pembangunan berkelanjutan, meskipun harus berhadapan dengan kejenuhan masyarakat terhadap pola kepemimpinan yang dianggap tidak banyak berubah. Sementara itu, Lingga & Erlina menekankan kedekatan identitas, pengalaman, dan kekuatan politik yang sudah dimiliki untuk membangun rasa aman dan kepercayaan. Perbedaan pesan ini menunjukkan bahwa persaingan Pilkada tidak hanya soal program, tetapi juga tentang cara meyakinkan masyarakat agar merasa paling cocok dengan calon tertentu.

3. Saluran Kampanye dan Pola Distribusi Pesan Politik

Dalam menyampaikan pesan politik, tim pemenang Dedi & Topani memprioritaskan pertemuan langsung atau tatap muka dengan masyarakat. Meskipun penggunaan saluran media lain tetap dilakukan, seperti media sosial dan alat peraga kampanye berupa baliho, banner, kaos, dan suvenir, tatap muka tetap diposisikan sebagai saluran utama. Ahmad Husaini menegaskan bahwa *"media yang menurut kami paling efektif tetap pertemuan langsung, tatap muka dengan masyarakat."* Tatap muka dinilai lebih efektif karena *"tingkat kepaahaman masyarakat lebih tinggi"* sehingga pesan politik dapat diterima secara utuh. Media sosial dan media lainnya kemudian digunakan sebagai saluran pendukung setelah konsolidasi tim dilakukan. Strategi ini menunjukkan penyesuaian saluran komunikasi dengan karakteristik masyarakat Pesisir Barat yang masih kuat dalam interaksi langsung.

Pendekatan yang sedikit berbeda terlihat pada Tim koalisi Septi & Ade. Tim ini tidak hanya bertumpu pada kerja-kerja lapangan secara langsung, tetapi juga mengombinasikannya dengan berbagai saluran komunikasi lain. Media sosial dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pesan, terutama kepada pemilih muda dan masyarakat yang aktif di ruang digital. Sementara itu, media konvensional seperti baliho, spanduk, kaos kampanye, dan alat peraga lainnya tetap digunakan untuk menjaga kehadiran kandidat di ruang publik. Di luar penggunaan media, Tim juga aktif membangun komunikasi sosial melalui berbagai kegiatan bersama masyarakat. Lewat kegiatan-kegiatan inilah hubungan antara tim pemenang dan warga terbangun lebih dekat, suasananya lebih cair, dan pesan politik dapat disampaikan secara lebih personal.

Sementara itu, dalam konteks penyaluran pesan yang lebih terorganisasi, tim pemenang Lingga & Erlina memanfaatkan Rumah Pemenangan sebagai sekretariat sekaligus ruang konsolidasi. Dari tempat ini, berbagai alat peraga kampanye seperti banner, spanduk, selebaran, dan stiker dikelola dan kemudian disebar ke lapangan secara terstruktur. Penggunaan kaos kampanye relatif terbatas dan tidak menjadi saluran utama. Pola ini menunjukkan bahwa Rumah Pemenangan berfungsi sebagai pusat kendali distribusi pesan politik, dengan penekanan pada pengelolaan logistik dan koordinasi internal tim.

Adanya sedikit perbedaan saluran komunikasi tiap tim pemenang menunjukkan cara mereka membaca persaingan politik lokal. Tim Dedi & Topani mengandalkan tatap muka untuk membangun kepercayaan langsung dengan masyarakat. Tim Septi & Ade mengombinasikan pertemuan langsung dengan pemanfaatan media untuk memperluas jangkauan pemilih. Sementara itu, Tim Lingga & Erlina menekankan pengelolaan dan koordinasi pesan secara terstruktur agar tetap konsisten di berbagai wilayah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kampanye tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh ketepatan memilih cara menyampaikannya kepada masyarakat.

4. Pemetaan Sasaran Kampanye dalam Realitas Politik Lokal

Tim Pemenangan Dedi & Topani pada dasarnya menysasar seluruh lapisan masyarakat tanpa membatasi kelompok tertentu. Sasaran komunikasi mencakup nelayan, petani, buruh, pemuda, perempuan dan ibu rumah tangga, hingga pekerja sektor transportasi seperti sopir L300. Pendekatan ini menunjukkan keinginan tim untuk merangkul dukungan secara luas. Namun, dalam praktiknya tidak semua kelompok mudah dijangkau. Ahmad Husaini mengungkapkan *bahwa “kelompok yang paling sulit kami tembus memang berasal dari kalangan aparat, pejabat, dan ASN.”* Selain itu, tim juga menemukan bahwa perilaku pemilih di lapangan sering kali berbeda dari perkiraan awal, sehingga strategi komunikasi perlu terus disesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat.

Hal yang hampir sama juga dialami oleh tim koalisi Septi & Ade. Secara strategi, sasaran politik memang ditujukan kepada seluruh masyarakat, tetapi hasil pemetaan menunjukkan adanya keterbatasan, terutama di lingkungan birokrasi desa. Ruspandi menjelaskan bahwa perangkat desa dan kepala desa tidak bisa sepenuhnya digerakkan karena banyak di antaranya memiliki hubungan kekerabatan dengan kandidat lain. Situasi ini dipahami sejak awal sebagai kondisi lapangan yang tidak dapat diubah, sehingga tim tidak menggantungkan strategi pemenangan pada dukungan birokrasi.

Sementara itu, Tim Lingga & Erlina juga menyampaikan bahwa sasaran kampanye mereka mencakup semua kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang etnis maupun agama. Rohan Efendi menegaskan bahwa *“dalam kampanye kita rangkul semua, tidak pandang bulu,” termasuk masyarakat nonpribumi, nonmuslim, dan warga di wilayah terpencil. Meski demikian, tim tetap memiliki perhitungan politik bahwa dukungan dari kelompok nonpribumi berpotensi menjadi faktor penting dalam menentukan hasil akhir kontestasi.”*

Meskipun semua pasangan calon menyatakan menysasar seluruh masyarakat, kenyataannya kemampuan menjangkau tiap kelompok berbeda. Tim Dedi & Topani lebih sulit masuk ke kalangan birokrasi karena berhadapan dengan kekuasaan yang sudah ada. Sebaliknya, posisi Septi & Ade sebagai pasangan yang diusung petahana membuat mereka relatif lebih mudah menjangkau lingkungan birokrasi, walaupun tetap dibatasi aturan netralitas. Sementara itu, Tim Lingga & Erlina merangkul semua kelompok masyarakat, tetapi tetap melakukan perhitungan terhadap kelompok pemilih yang dianggap penting. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran kampanye tidak hanya ditentukan oleh keinginan tim, tetapi juga oleh posisi politik dan hubungan kekuasaan di tingkat lokal.

5. Efek Komunikasi Politik dalam Interaksi Tim dan Pemilih

Efek/dampak komunikasi politik Tim Pemenangan Dedi & Topani terutama terlihat dari perubahan cara pandang sebagian masyarakat setelah kegiatan kampanye dilakukan. Ahmad Husaini menjelaskan bahwa *“setiap selesai mengadakan kampanye, kami selalu melakukan evaluasi.”* Dari evaluasi tersebut, tim melihat adanya peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya terkait program bantuan sosial seperti PKH dan BPJS. Sebelumnya, banyak warga mengira program-program itu merupakan kebijakan pemerintah daerah, padahal berasal dari pemerintah pusat. Penjelasan langsung di lapangan membantu meluruskan pemahaman tersebut dan membuat masyarakat lebih mengetahui posisi serta peran pemerintah dalam kebijakan sosial.

Perubahan serupa juga terlihat di Pemangku Pekon Biha Tuha. Pada awal kampanye, sebagian warga bahkan merasa takut untuk datang ke kegiatan politik. Namun setelah mendengarkan orasi dan penjelasan secara langsung, masyarakat mulai memahami tujuan serta arah perjuangan tim pemenangan. Setelah pertemuan itu, muncul keberanian warga untuk saling bercerita dan berdiskusi mengenai kampanye yang mereka ikuti. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tatap muka tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat.

Meski demikian, dampak komunikasi politik dalam kontestasi ini tidak sepenuhnya berujung pada keuntungan elektoral. Sejak awal, tim relawan Septi & Ade yang diketuai Ruspandi sebenarnya sudah membaca keterbatasan peluang melalui pemetaan kekuatan hingga tingkat dusun. Ruspandi mengakui

bahwa “*sejak pertengahan masa kampanye tim sudah memahami arah kekalahan yang akan dihadapi.*” Dalam konteks ini, komunikasi politik lebih berfungsi sebagai sarana membangun kesadaran politik masyarakat dan refleksi internal tim, bukan semata-mata alat untuk memenangkan suara.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Rohan Efendi yang menegaskan bahwa komunikasi politik tidak bekerja secara tunggal dalam menentukan hasil Pilkada. Ia menyatakan bahwa “*masyarakat Pesisir Barat ini masih sangat kaku memaknai politik, politik itu duit, politik itu bisa dibeli.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor finansial dan budaya politik pragmatis masih memiliki pengaruh kuat. Dengan demikian, meskipun komunikasi politik mampu mengubah pemahaman dan sikap sebagian masyarakat, pengaruhnya tetap dibatasi oleh realitas sosial dan budaya politik yang berkembang di Pesisir Barat.

Komunikasi politik dalam Pilkada Pesisir Barat 2024 lebih banyak memengaruhi cara berpikir dan sikap masyarakat daripada langsung menentukan kemenangan. Melalui komunikasi tatap muka, seperti yang dilakukan Tim Dedi & Topani, masyarakat menjadi lebih paham tentang isu politik dan kebijakan sosial, serta lebih berani terlibat dan berdiskusi. Namun, pengalaman Tim Septi & Ade menunjukkan bahwa sebaik apa pun komunikasi yang dilakukan, hasil Pilkada tidak hanya ditentukan oleh pesan dan cara menyampaikannya. Faktor lain seperti kekuatan politik yang telah terbentuk, peran sumber daya finansial, serta kebiasaan politik yang pragmatis masih memiliki pengaruh dalam menentukan pilihan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi politik di Pesisir Barat lebih terlihat dampaknya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik warga, meskipun belum sepenuhnya menjadi faktor utama dalam menentukan hasil pemilihan.

Peran Penyelenggara Pilkada dalam Mengelola Dinamika Politik Lokal di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat, Miftah Farid, S.I.Kom, persaingan politik dalam Pilkada 2024 merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Menurut KPU, perbedaan kepentingan dan upaya setiap pasangan calon untuk menang tidak dapat dihindari. Sebagaimana disampaikan Ketua KPU bahwa “*politik memang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan dan upaya para aktor untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, namun sebagai penyelenggara kami bertugas menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan sesuai aturan.*” Oleh karena itu, persaingan politik harus dikelola dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan konflik dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pilkada.

KPU memandang bahwa besar kecilnya dukungan partai politik kepada pasangan calon bukan menjadi persoalan utama bagi penyelenggara. Yang terpenting adalah seluruh pasangan calon telah memenuhi syarat pencalonan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketua KPU menegaskan bahwa “*soal pasangan calon didukung lima partai atau lebih itu bukan ranah KPU, yang paling penting syarat pencalonan terpenuhi sesuai ambang batas yang diatur undang-undang.*” Selama persyaratan tersebut dipenuhi, KPU berkewajiban memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pasangan calon tanpa membedakan kekuatan politik yang dimiliki, sebagai bentuk komitmen terhadap asas keadilan dan kesetaraan.

Dalam pelaksanaannya, KPU menyadari bahwa persaingan politik lokal sering kali diikuti dengan tekanan, kritik, dan kecurigaan dari berbagai pihak. Untuk menyikapi kondisi tersebut, KPU tetap membuka ruang komunikasi dengan partai politik, tim pemenang, dan masyarakat. Namun, komunikasi tersebut dibatasi agar tidak melanggar aturan dan tidak memengaruhi sikap netral penyelenggara. Ketua KPU menyatakan bahwa “*setiap bentuk tekanan, janji politik, bahkan ancaman tetap kami respons dengan tenang, tetapi ketika sudah mengarah pada pelanggaran aturan, kami sepakat untuk membatasi.*” Pendekatan ini dilakukan agar dinamika politik tidak mengganggu integritas penyelenggaraan Pilkada.

Setelah Pilkada selesai, KPU melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan

penyelenggaraan. Adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang sah. Meski gugatan tersebut tidak berlanjut, KPU menjadikannya sebagai bahan pembelajaran. Menurut Ketua KPU, “*meskipun gugatan akhirnya gugur, hal tersebut menjadi refleksi penting bagi kami untuk terus memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia.*” Evaluasi difokuskan pada penguatan pemahaman regulasi dan peningkatan kapasitas jajaran penyelenggara. Secara umum, KPU menilai bahwa persaingan politik dalam Pilkada Pesisir Barat 2024 berlangsung dinamis dan penuh tantangan, namun masih dapat dikelola selama seluruh tahapan dijalankan sesuai aturan dan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik tim pemenang Dedi Irawan dan Irawan Topani dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 dibangun melalui proses yang bertahap dan kontekstual. Strategi tidak hanya dirancang sebagai rencana awal, tetapi berkembang mengikuti dinamika persaingan politik dan respons masyarakat di lapangan. Cara tim membaca kekuatan dan kelemahan lawan menjadi dasar dalam menentukan arah komunikasi politik yang dijalankan. Narasi perubahan berperan sebagai benang merah yang menghubungkan pesan politik, peran komunikator, dan aktivitas kampanye selama proses Pilkada berlangsung. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi politik lebih berdampak pada perubahan pemahaman dan sikap sebagian masyarakat dibandingkan secara langsung menentukan kemenangan elektoral. Komunikasi tatap muka membantu masyarakat memahami isu politik dan kebijakan publik, serta mendorong keterlibatan dalam diskusi politik. Namun, temuan dari tim lawan mengindikasikan bahwa pilihan pemilih tetap dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kekuatan politik yang telah terbentuk, sumber daya finansial, dan budaya politik yang cenderung pragmatis. Strategi komunikasi politik dalam Pilkada Pesisir Barat Tahun 2024 berfungsi sebagai sarana pembentukan makna dan kesadaran politik masyarakat, meskipun tidak bekerja secara tunggal dalam menentukan hasil pemilihan. Strategi komunikasi berinteraksi dengan kondisi sosial dan politik lokal yang membentuk batas sekaligus peluang dalam kontestasi politik. Saran bagi pendidikan politik agar menjadikan artikel ini sebagai salah satu sumber kajian dalam proses pendidikan politik khususnya pada pembahasan komunikasi politik tim pemenang Pilkada. Bagi mahasiswa agar menjadikan artikel ini sebagai pembelajaran proses politik untuk kemenangan paslon dalam pilkada, sarta menambah wawasan tentang pentingnya peran komunikasi politik yang baik dalam rangka kemenangan paslon dalam Pilkada. Bagi Peneliti selanjutnya agar meneliti lebih jauh terkait variabel lain yang terkait dengan proses memenangkan paslon dalam pilkada.

REFERENSI

- Aidil. (2024). *Pasangan Dedi Irawan-Topani Resmi Daftar ke KPU Pesisir Barat*. Potensinews.Id. <https://potensinews.id/daerah/pesisir-barat/pasangan-dedi-irawan-topani-resmi-daftar-ke-kpu-pesisir-barat/>
- Aldiyan Rizky. (2022). Kekuatan Modal Dalam Pemilihan Bupati Way Kanan 2020. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(8.5.2017), 16972. <https://lib.unnes.ac.id/20002/>
- Barat, K. K. P. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 922 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2024*. JDIH Komisi Pemilihan Umum.
- Britto, Y. De, Triwicaksono, B., & Nugroho, A. (2021). Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5(1), 133–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i1.2037>
- Cangara, H. (2018a). *Komunikasi Politik* (6th ed.). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cangara, H. (2018b). *Komunikasi Politik* (6th ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Dkk, Y. H. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah* (Cetakan ke). PT. Raja Grafindo Persada.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

35

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



- Goestyari Kurnia Amantha, K. J. F. (2021). Strategi Politik Pasangan Nanang-Pandu Dalam Kontestasi Pemilukada Lampung Selatan Tahun 2020. *Jurnal Polinter*, 7(1), 6.
- Gustina, E. (2024). *Pilkada Pesisir Barat, Lingga - Erlina Daftar ke KPU*. RMOLLAMPUNG. <https://rmollampung.id/pilkada-pesisir-barat-lingga-erlina-resmi-daftar-ke-kpu>
- Husaini Ahmad, S. P. . (2025). *Wawancara Terkait Strategi Pemenangan Paslon Dedi - Topani dengan Sekretaris Tim Pemenangan*.
- Lia Lestari Anjelina, D. (2025). Penerapan Strategi Komunikasi Eksternal Dalam Meningkatkan Loyalitas Mitra Cv. Artha Rasindo. *EduTIK: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 5, 1659–1665.
- Maulida, K., & Kurniawan, R. C. (2021). *Strategi Pemenangan Eva Dwiana dan Dedy Amarullah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*. 6(2). <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11708>
- Moleong, J. L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.). PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasuhaidi, N., Anshori, M. W., & Beriansyah, A. (2025). Konstelasi Kekuatan Politik Lokal Dalam Pilkada Gubernur Jambi 2024: Studi Kasus Dari Perspektif Teori Elite. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 8(02), 317–334. <https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6124>
- Prantoso, Y. (n.d.). *Didampingi Massa Pendukung, Pasangan Septi-Ade Resmi Daftar ke KPU Pesisir Barat*. MediaLampung. <https://medialampung.disway.id/politik/read/683035/didampingi-massa-pendukung-pasangan-septi-ade-resmi-daftar-ke-kpu-pesisir-barat>
- Prima, A. (n.d.). *PEMILUPEDIA: Daftar Provinsi, Kota/Kabupaten yang Menggelar Pilkada Serentak 2024*. MetroTVnews. Retrieved February 5, 2026, from <https://www.metrotvnews.com/read/b7WCYmgP-pemilupedia-daftar-provinsi-kota-kabupaten-yang-menggelar-pilkada-serentak-2024>
- Redaksi. (2023). *Dampak Pilkada 2024, Masa Jabatan Delapan Bupati dan Walikota di Provinsi Lampung Dipangkas Dua Tahun*. Nurani Rakyat. <https://www.nuranirakyat.com/2023/01/bandar-lampung-masa-jabatan-8.htmlhttps://www.nuranirakyat.com/2023/01/bandar-lampung-masa-jabatan-8.html>
- Rohan, E. (2025). *Wawancara Terkait Strategi Pemenangan Pasangan Calon Lingga Erlina dengan Ketua Tim Pemenangan*.
- Ruspandi. (2025). *Wawancara Terkait Strategi Pasangan Calon Septi & Ade dengan Ketua HKBN*.
- Salim, C. (2019). Dinamika Politik Perempuan Dalam Kontestasi Pilkada Di Provinsi Lampung. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 03(2), 291.
- Silviana. (2024a). *Profil Dedi Irawan, Pengusaha Muda Calon Bupati Pesisir Barat*. IDN Times Lampung. <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/profil-dedi-irawan-pengusaha-muda-calon-bupati-pesisir-barat-00-jf67w-m29flb>
- Silviana. (2024b). *Profil Lingga Kusuma, Usai PLH Tergiuur Nyalon Bupati Pesisir Barat*. IDN Times Lampung. <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/profil-lingga-kusuma-usai-plh-tergiuurnyalon-bupati-pesisir-barat-00-jf67w-59y43y>
- Silviana. (2024c). *Profil Septi Heri, Istri Petahana Nyalon Bupati Pesisir Barat*. IDN Times Lampung. <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/profil-septi-heri-istri-petahana-nyalon-bupati-pesisir-barat-00-jf67w-793pv0>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.); 5th ed.). ALFABETA, CV.
- Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>
- Umum, K. P. (2024). *Pengumuman Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024*. KPU.GO.ID. <https://kab-pesisirbarat.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-penetapan-hasil-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kabupaten-pesisir-barat-tahun-2024>

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 3 Maret 2026

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Ministry of the State Secretariat of the Republic of Indonesia 1 (2016). https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf

Walisongo, J. P. (2023). Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer. *Jurnal Politik Walisongo*,